

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah Pekerja Harian Lepas membuktikan bahwa Pekerja Harian Lepas tersebut memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Namun, status Pekerja Harian Lepas dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya adalah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa mereka tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sebab dalam perjanjian kerjanya hanya sebatas dengan sistem kontrak dan bisa diperpanjang apabila dalam evaluasi kinerja dianggap memuaskan, sehingga bagi mereka yang ingin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil harus melalui seleksi sesuai dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara. Adapun permasalahan Bagaimanakah bentuk perjanjian Pekerja Harian Lepas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung? Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Pekerja Harian Lepas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung jika dihubungkan dengan BAB VII A Buku III KUHPerdara?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Analisis data yang digunakan dengan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Bentuk Perjanjian Pekerja Harian Lepas ini ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung adalah sifatnya tertulis artinya PKWT itu ada sejak adanya ikatan sepakat yang merupakan sahnya suatu perjanjian. Bentuk pelaksanaan perjanjian kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dengan PHL berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum dilakukan dengan baik. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dalam isi perjanjian kerja. Bentuk ketentuan atau klausul di surat perjanjian melaksanakan pekerjaan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung adalah tidak tercantumnya dalam klausul kontrak kerja pegawai beberapa jenis tunjangan, seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan kecelakaan. Selain itu adanya klausul yang mencantumkan bahwa PHL tidak berhak menuntut untuk menjadi ASN atau PPPK. Hal tersebut mengakibatkan PHL merasa tidak dihargai kompetensinya, tidak adanya prioritas maupun kemudahan untuk PHL untuk menjadi pegawai tetap. Pelaksanaan Perjanjian Pekerja Harian Lepas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung jika dihubungkan dengan BAB VII A Buku III KUHPerdara adalah Perjanjian kerja PHL dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung merupakan kontrak yang obligatoir, maka ketentuan di dalam Buku Tiga Bab VII A KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan dari bagian kesatu sampai bagian ke empat dapat diperlakukan terhadap kontrak kerja.

ABSTRACT

The increasing number of Freelance Daily Workers proves that the Freelance Daily Worker is really needed by the government. However, on the other hand, the status of Freelance Daily Workers in its implementation raises several problems, including the legislation that explains that they cannot be appointed as civil servants, because the work agreement is only limited to the contract system and can be extended if under evaluation performance is considered satisfactory, so for those who want to become Prospective Civil Servants must go through selection in accordance with the lex of the State Civil Apparatus. As for the problem, what is the form of the agreement for Freelance Workers based on Lex Number 13 Year 2003 concerning Manpower at Bandung Fire Department? How is the implementation of the agreement of Freelance Workers at the Bandung Fire Department if connected with Chapter VII A Book III of the Indonesian Civil Code?

The research method used is a normative juridical approach, which sets certain norms to a phenomenon by reviewing secondary data. Analysis of data used by qualitative juridical methods is sourced and studied literature and field studies, then systematically arranged, after descriptive analysis. Research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.

This form of a Freelance Daily Worker Agreement turns out that based on Lex Number 13 Year 2003 on Employment established by the Bandung City Fire Department is written in nature, meaning that the PKWT exists since the bond of agreement was signed, which is the validity of an agreement. The form of the implementation of the work agreement of the Bandung City Fire Department with PHL based on the Manpower Act is still not done properly. This discrepancy can be seen in the contents of the employment agreement. The form of provisions or clauses in the agreement to carry out work in the Bandung City Fire Department is not included in the employment contract clauses of several types of benefits, such as medical benefits and accident benefits. In addition, there is a clause that states that PHL has no right to claim to become ASN or PPPK. This causes PHL to feel that its compliance is not respected, there are no priorities or facilities for PHL to become permanent employees. Implementation of the Daily Workers Release Agreement at the Bandung City Fire Service if linked to Chapter VII A Book III of the Indonesian Civil Code is a PHL work agreement with the City of Bandung Fire Department is an obligatory contract, then the provisions in Book Three of Chapter VIIA of the Indonesian Civil Code about the agreements that were born from contract or agreement from the first to the fourth part can be treated with the employment contract.